

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Tengah telah memenuhi mandat normatif, ideal, dan faktualnya dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa SMA di Kota Semarang melalui Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Namun, efisiensi peran tersebut belum optimal, dan terdapat indikasi bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja belum turun ke level terendah (sekitar 297 kasus pada tahun 2024 di Kota Semarang), serta program rehabilitasi melaporkan tingkat keberhasilan rata-rata 78,4 persen namun sering terganggu oleh relaps. Inovasi seperti podcast keliling dan kampanye digital telah diperkenalkan, tetapi implementasi di lapangan masih terbatas oleh hambatan struktural.

Benang merah utama menunjukkan bahwa peran BNNP dalam P4GN telah diperkenalkan pada tiga dimensi (normatif, ideal, faktual), namun konsistensinya terhambat oleh ketidakselarasan antara aturan yang kuat dan realitas di lapangan yang dipenuhi stigma sosial, birokrasi, dan keterbatasan sumber daya. **Secara normatif**, BNNP didasarkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun secara praktis, hal ini dibatasi oleh stigma rehabilitasi dan standar SOP yang buruk. **Secara ideal**, mandat kolaboratif dan humanis dibangun melalui kerja sama lintas sektor, yang belum stabil karena ketidakramahan sekolah dan dilema antara penegakan

hukum dan rehabilitasi. **Secara faktual**, inovasi digital diperkenalkan, tetapi respons terbatas akibat tantangan perilaku remaja dan modus peredaran narkoba yang terselubung. Secara keseluruhan, benang merah ini menegaskan bahwa penanggulangan narkoba di kalangan pelajar SMA belum mencapai efektivitas maksimal, dengan fokus utama pada pencegahan dini dan rehabilitasi yang sering terganggu oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan struktural.

Masalah struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran (yang berdampak negatif pada jangkauan program seperti tes urine dan rehabilitasi rawat inap), birokrasi, dan ketidakhadiran koordinasi antar lembaga (perbedaan administrasi dan birokrasi yang lambat membuat kerja sama sulit), stigma sosial dan resistensi institusional (stigma terhadap pengguna narkoba dan resistensi terhadap sekolah membuat sulit untuk mengatasi siklus penyalahgunaan), praktik perdagangan narkoba yang adaptif dan tersembunyi (resistensi terhadap penggunaan media sosial, makanan/minuman, dan vape membuat deteksi menjadi lebih rumit), serta keterlibatan komunitas. Tantangan ini saling terkait, membentuk siklus penghambat yang memerlukan reformasi sistemik untuk meningkatkan efektivitas P4GN.

4.2 Saran

Adapun berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat direkomendasikan beberapa hal berikut :

1. BNNP perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM dan meningkatkan dan mengembangkan strategi dalam

sektor digital agar lebih menarik dan tepat sasaran.

2. Selain itu BNNP perlu mengusulkan prioritas alokasi anggaran melalui APBN untuk memperluas sarana prasarana, seperti pusat konseling terpadu dan pelayanan rawat inap.
3. BNNP dapat memperluas program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam wilayah Jawa Tengah agar pencegahan dapat menjangkau seluruh sekolah dan lapisan masyarakat di lingkup daerah.
4. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran melalui partisipasi aktif dalam program BNNP Jawa Tengah dan ikut serta dalam menyebarkan informasi di lingkungannya.